

ISU PENDIDIKAN DALAM KAMPANYE POLITIK

EDUCATIONAL ISSUES IN POLITICAL CAMPAIGN

Diyana Nur Rakhmah Wisudawati
Sekretariat Balitbang, Kemdikbud
Gedung E lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta Pusat
e-mail: diyan.rakhmah@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 22/07/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 10/09/2014; Disetujui tanggal: 03/12/2014

Abstract: *The aim of this paper was to identify educational issues commonly used by political parties or candidates for district head/head of state to gain community support the campaign as education can serve as a medium of attraction in determining the direction of support and affiliation to political parties/candidates of particular district head/state head. Data and information were collected by literature study and analyzed using descriptive qualitative approach. It is concluded that political parties have tendency to raise similar educational issues such as implementing free education, improving quality of teachers and educators, and increasing facilities and educational budget. In some cases these issues are proven to be very effective in maximizing community support regarding the process of determining the local leaders through the electoral process. What makes it so attractive in the political process is because education is considered as one of the essential parts of human basic needs which is a part of welfare enhancement process.*

Keywords: *kampanye, politik, isu pendidikan*

Abstrak: *Tulisan ini untuk mengkaji isu pendidikan yang lazim digunakan partai politik atau calon Kepala Daerah/Kepala Negara untuk menjaring dukungan masyarakat dalam kampanye. Isu-isu pendidikan dapat menjadi daya tarik masyarakat dalam menentukan dukungan dan arah afiliasi terhadap partai politik/calon Kepala Daerah/Kepala Negara tertentu. Data dan informasi diperoleh melalui studi literatur yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Kesimpulannya adalah bahwa isu pendidikan yang ditawarkan partai politik dalam kampanye memiliki kecenderungan yang sama antar partai politik/antar peserta kampanye, di antaranya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan gratis, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan anggaran bidang pendidikan. Pada beberapa kasus terbukti bahwa isu tersebut berhasil memaksimalkan dukungan masyarakat dalam proses penentuan pemimpin daerah melalui proses pemilihan umum. Daya tarik isu pendidikan dalam proses politik disebabkan karena pendidikan dinilai sebagai salah satu bagian penting dari kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari proses menuju peningkatan kesejahteraan hidup.*

Kata kunci: *kampanye, politik, isu pendidikan*

Pendahuluan

Kehidupan demokrasi di Indonesia menggeliat bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Era Orde Baru yang kemudian berganti dengan era Orde Reformasi. Reformasi mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan jalannya pemerintahan yang diakomodir melalui

demokrasi. Jika pada orde sebelumnya demokrasi berjalan tidak semestinya karena terbelenggu oleh sikap penguasa yang represif dan intimidatif, maka pada era reformasi, demokrasi berjalan atas dasar kesadaran individu masyarakat yang merupakan elemen terpenting dalam kehidupan bernegara.

Kehidupan politik Indonesia telah melalui banyak pergolotan dan diskursus mengenai konsep ketatanegaraan dan model pembangunan paska reformasi (Yusuf & Ma'ruf, 2004). Pada era ini, rakyat mengambil peran penting dalam menentukan arah perpolitikan dan pemerintahan Indonesia, di mana praktik demokrasi rakyat mulai dijalankan kembali secara optimal melalui beragam bentuk partisipasi politik.

Kemunculan banyak partai politik merupakan salah satu parameter peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik (Budiardjo, 2000). Selanjutnya dikemukakan bahwa partai politik merupakan instrumen yang menjembatani pemimpin dalam lingkaran sistem politik, dengan rakyat yang dipimpinnya. Partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi dan bertujuan untuk meraih dukungan optimal dari masyarakat melalui proses pemenangan dalam pemilihan umum (pemilu). Dalam perannya sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik menjalankan tahap diseminasi visi dan misi partai yang bertujuan untuk menarik simpati publik dan memenangkan kompetisi politik dalam pesta demokrasi melalui sarana kampanye. Pada masa kampanye, setiap partai politik berlomba meraih dukungan dari masyarakat agar dapat menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda pemerintahan dan menduduki puncak pemerintahan.

Secara alamiah, tujuan utama setiap partai politik adalah sama, walau tidak identik. Tujuan utama setiap partai politik adalah menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum yang telah mereka buat (Soltau, 1961). Dukungan rakyat menjadi kunci penting yang menentukan apakah sebuah partai politik berhasil memenangkan kompetisi demokrasi atas partai politik yang lain atau sebaliknya.

Pada dasarnya, latar belakang keberadaan sebuah partai politik adalah perjuangan terhadap hak-hak kepentingan umum. Kendati demikian, pada tataran praktik dapat bergeser pada perjuangan kepentingan partai politik dan kepentingan personal di dalamnya. Pada setiap masa diseminasi visi dan misi setiap partai politik yang dilakukan melalui pesta demokrasi, kampanye menjadi salah satu media efektif penggalangan dukungan masyarakat terhadap

partai politik. Politik tanpa kampanye dapat dipastikan tidak mungkin, karena bagi partai dan tokoh politik, kampanye merupakan transisi ritual periodis untuk memperkenalkan janji-janji kepada masyarakat (Prasojo, 2005). Beragam isu strategis ditawarkan sebagai komoditas utama para partai politik untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Isu-isu populer menjadi objek utama "jualan" politik setiap partai dalam menarik dukungan publik (Fineman dalam Ghazaly, 2014)

Salah satu isu strategis yang populer di tengah masyarakat yang dinilai sukses menghimpun simpati rakyat yaitu terkait dengan pendidikan. Isu pendidikan dinilai penting karena merupakan salah satu hak dasar manusia dan merupakan indikator kunci perkembangan bangsa. Sebuah kajian mencatat, bahwa pendidikan menjadi salah satu isu menarik dalam setiap kampanye politik selain isu-isu terkait peningkatan kesejahteraan, kemiskinan, kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, isu gender, serta masalah birokrasi (Nasution, 2014). Pendidikan menjadi kebutuhan masing-masing orang dengan sifatnya yang berkesinambungan dan memberikan efek sebab akibat pada kehidupan seseorang di kemudian hari. Pendidikan merupakan bagian dari persoalan kehidupan, dan seluruh proses kehidupan manusia adalah proses pendidikan (Lodge dalam Tambak, 2013). Dalam konteks pendidikan sebagai sebuah isu yang seringkali diusung oleh setiap partai politik dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Permasalahannya ialah bagaimana peranan isu pendidikan dalam menentukan pilihan politik masyarakat dan implementasinya pada ranah kebijakan pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang peranan isu pendidikan dalam menentukan pilihan politik masyarakat dan implementasinya pada ranah kebijakan pendidikan.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengambil kebijakan bidang pendidikan untuk mempertimbangkan beragam isu yang dinilai strategis di bidang pendidikan, serta dinilai penting dan signifikan dampaknya bagi masyarakat, sehingga dapat direkomendasikan sebagai prioritas kebijakan pendidikan di masa depan. Bagi masyarakat, tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam membuka

cakrawala berpikir masyarakat secara kritis dalam proses pembelajaran politik melalui sistem demokrasi yang dinamis.

Kajian Literatur

Teori Pilihan Publik (*Public Choice*)

Dinamika dan perkembangan lingkungan masyarakat memberikan perspektif baru bahwa fenomena sosial politik memiliki korelasi dengan ekonomi dan memberikan pengaruh besar dalam tatanan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari negara. Fenomena ini oleh beberapa ahli dianalisis melalui salah satu teori yaitu Teori Pilihan Publik (*Public Choice*). Teori Pilihan Publik adalah perspektif di bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan metode Ilmu ekonomi, dan berguna untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena nonpasar (Buchanan, 1989). Teori Pilihan Publik selanjutnya dijabarkan melalui perspektif *Public Choice* yang terdiri atas 2 (dua) aspek, yaitu pendekatan *Catallaxy* dan pendekatan *Homo Economicus*.

Aspek *catallaxy* menganalogikan politik layaknya ekonomi sebagai ilmu yang mengandung transaksi pertukaran di dalamnya. Interaksi politik adalah pertukaran yang kompleks dan dalam paradigma konvensional, ilmu politik dapat terperangkap hanya sebagai ilmu yang menganalisis permainan kekuasaan (Rachbini, 2002). Paradigma *catallaxy* (pertukaran) diperlukan bersama dengan paradigma kesukarelaan untuk memperbaiki identitas politik yang selama ini dikorelasikan dengan paradigma kekuasaan semata. Jika dalam konsep ilmu ekonomi menjelaskan fenomena pasar, yaitu bertemunya penjual dan pembeli, maka ilmu ekonomi politik baru juga dapat menjelaskan konsep pasar politik (*political market*) yang di dalamnya terjadi pertukaran antara partai politik dengan pemilih dan antara pemerintah dengan rakyatnya. Sikap rasional pelaku pasar, yaitu memaksimalkan keuntungan dan utilitas juga berlaku dalam pasar politik. Pemilih memaksimalkan kesejahteraan dan aspirasi politik, sedangkan partai politik memaksimalkan anggaran untuk mencapai kesejahteraan dan harapan pemilihnya sehingga dapat meningkatkan perolehan suara/dukungan.

Mengadopsi konsep dalam ilmu ekonomi, perspektif Pilihan Publik menawarkan wujud politik dan proses politik yang terbuka sebagai sebuah proses pertukaran kolektif antara pemegang kekuasaan (partai politik atau pemerintah) dan masyarakat (pemilih). Teori Pilihan Publik menawarkan solusi perbaikan politik melalui reformasi aturan dan kerangka dasar pemerintahan di mana transaksi politik dilakukan atas dasar falsafah yang bersifat kesukarelaan dan didukung dengan aturan yang disetujui bersama.

Dalam konteks kehidupan demokrasi politik di Indonesia, Teori Pilihan Publik memegang peranan penting dalam menjelaskan fenomena politik yang terjadi di masyarakat. Secara mendasar, masyarakat akan memberikan dukungan politik kepada partai politik, calon kepala daerah/negara, calon legislator, dan calon pemegang kekuasaan lainnya yang menawarkan masa depan kehidupan yang lebih baik, kemungkinan kehidupan politik yang lebih demokratis, dan peningkatan kesejahteraan hidup yang meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Partai politik dan calon pemegang kekuasaan lainnya yang dinilai lebih rasional dalam hal ketercapaian dan komitmen merealisasikan janji politiknya memiliki dukungan lebih tinggi dan optimal dibandingkan calon lain yang dinilai kurang realistis dan *feasible*. Dalam konteks inilah paradigma ekonomi memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Politik dan Kampanye

Politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam sebuah sistem kekuasaan atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik dan menjalankan tujuan-tujuan tersebut (Budiardjo, 2000). Politik mengandung aspek pengambilan *kebijakan* (*decision making*) mengenai tujuan utama dari sistem politik tersebut dan penyusunan skala prioritas dan seleksi terhadap berbagai tujuan yang ada dalam sistem politik tersebut. Kebijakan umum (*public policies*) dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, yang di dalamnya terkait dengan pengaturan dan pembagian atau alokasi dari berbagai sumber daya yang ada.

Nilai dominan dari istilah politik adalah kepemilikan terhadap kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang keduanya digunakan untuk membina kerja sama, menyelesaikan konflik dan melakukan tindakan lain yang akan timbul dan diperlukan pada perjalanan proses pencapaian tujuan politik. Pencapaian terhadap kepemilikan kekuasaan dan kewenangan dalam politik dilakukan melalui langkah persuasi (meyakinkan) atau koersi (paksaan) terhadap masyarakat. Politik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat (Barents, 1965), dan keberadaan masyarakat adalah hal utama dalam politik.

Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek politik. Tujuan dari politik merupakan manifesto dari tujuan hidup dan harapan masyarakat, sehingga inti dari adanya politik dan beragam elemen di dalamnya adalah mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat untuk mencapai kekuasaan dalam pemerintahan agar dapat mencapai cita-cita politik dan masyarakat. Rakyat mengharapkan para elit pemerintahan yang terbentuk dari jalannya sistem politik untuk dapat mengatur dan menyediakan seluruh kebutuhan rakyat. Suatu pemerintah yang kuat terbentuk dari kesiapan yang juga kuat dari masyarakat, yang akan menciptakan budaya politik bersifat "agama politik" (*political religion*), yaitu politik memiliki peran yang kuat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat (Apter dalam Widjaja, 1982).

Kampanye merupakan salah satu budaya politik demokratis yang melibatkan partai politik, masyarakat, dan berbagai aktor politik. Kampanye merupakan sarana memobilisasi pemilih yang di dalamnya terdapat proses penyampaian visi, misi, dan program politik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat sebagai *vote getter*. Politik tanpa kampanye dipastikan tidak mungkin, karena kampanye juga merupakan sarana masyarakat mendapatkan gambaran terhadap fungsi sistem politik sekaligus menempatkan masyarakat sebagai evaluator sistem politik (Prasojo, 2005).

Kampanye sebagai media memperkenalkan program politik yang juga diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan perolehan suara sebuah

partai politik. Partai politik menilai bahwa kampanye merupakan sarana pembentukan keyakinan politik dalam lingkungan masyarakat yang memiliki pilihan beragam (*multioption society*), sehingga kampanye tidak jarang didefinisikan sebagai perjuangan kekuasaan (Prasojo, 2005). Proses pembentukan keyakinan politik melalui kampanye membuat partai politik berlomba untuk memasukkan isu strategis ke dalam agenda politiknya agar menarik dukungan maksimal dari masyarakat sebagai pemilih. Isu-isu terkait kebutuhan dasar, pemenuhan hak-hak asasi manusia dan berbagai isu strategis lain menjadi masalah utama yang ditawarkan partai politik kepada masyarakat.

Pendidikan sebagai Kebutuhan Hidup

Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung sepanjang hayat dan merupakan hasil dari interaksi individu, sosial, dan fisik (Henderson, 1959). Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dan berperan penting dalam pembentukan karakter manusia, proses untuk mencapai kesejahteraan hidup, serta menentukan masa depan hidup manusia. Kehidupan setiap manusia berjalan dengan tantangan, hambatan, dan kemajuannya yang menyebabkan munculnya keberhasilan atau kegagalan dalam hidup. Pendidikan berperan sebagai kebutuhan hidup yang bertujuan agar dengan pendidikan, setiap manusia dapat melalui proses kehidupan dan melakukan pembaharuan dalam hidupnya (*a renewal of life*).

Perkembangan lingkungan kehidupan manusia bergerak secara dinamis dan perubahan manusia secara bertahap (evolusi) merupakan sebuah keharusan agar manusia dapat bertahan hidup. Dalam konteks perubahan yang bertahap, manusia membutuhkan pendidikan sebagai media interaksi sosial antara sesamanya termasuk antara manusia dan lingkungannya. Pendidikan melalui jalur formal, informal, maupun nonformal berfungsi strategis dalam menentukan arah hidup seseorang. Atas dasar inilah, beragam isu terkait pendidikan seperti aksesibilitas pendidikan, media, fasilitas, dan pemerataan layanan pendidikan menjadi pusat perhatian masyarakat akan pembaharuan kebijakan di bidang pendidikan.

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan pelaksanaannya di bidang pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum dan aturan terkait dengan pendidikan dan proses pencapaian terhadap tujuan pendidikan (Nugroho, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan dan menentukan eksistensi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan sebuah negara (Olsen & O'Neil dalam Nugroho, 2008).

Dalam penafsiran yang tidak jauh berbeda, kebijakan pendidikan dijelaskan sebagai kebijakan yang bersifat publik dan mengatur aturan berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan pada praktiknya secara umum berbentuk keputusan dan pedoman yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan proses pendidikan.

Kebijakan pendidikan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dari pengambil kebijakan, karena kebijakan pendidikan berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki tahapan yang sama dengan proses kebijakan pada umumnya, yaitu tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan pendidikan memberikan pengaruh besar bagi sistem pendidikan di sebuah negara dan pengambilan keputusan dalam proses kebijakan tersebut yang berdampak luas bagi sistem pendidikan dan jalannya pendidikan baik dalam hal kualitas pendidikan, layanan pendidikan maupun aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diambil oleh sebuah negara melalui pemangku kebijakan akan memberikan dampak dan reaksi beragam dari masyarakat. Pada satu sisi, kebijakan pendidikan akan dinilai positif oleh masyarakat, namun pada sebagian orang, kebijakan pendi-

dikan dinilai belum memuaskan dan mengakomodir kepentingan masyarakat akan pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia, kampanye menjadi salah satu tahap penting pada serangkaian proses demokrasi yang tengah berjalan. Masyarakat sebagai pemilih memiliki kepentingan dan kebutuhan yang beragam. Manusia adalah makhluk rasional yang secara alamiah mengoptimalkan harapan dalam pencapaian kepentingan dan kebutuhannya. Politik memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk mengatasnamakan perilakunya pada kepentingan umum masyarakat. Politik merupakan dunia yang potensial menarik keterlibatan banyak pihak karena secara alamiah manusia bersifat dinamis dan tidak berada dalam ruang yang vakum. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan pilihan masyarakat pada partai politik dipengaruhi oleh banyak faktor. Keberagaman kepentingan yang menentukan kecenderungan pilihan masyarakat dalam sebuah proses politik memberikan alternatif pilihan masyarakat dalam berpolitik menjadi ikut beragam.

Dalam sistem politik demokrasi, suara rakyat merupakan penentu berhasil atau tidaknya pencapaian kekuasaan seseorang dalam pemerintahan. Suara atau dukungan masyarakat merupakan modal penting pencapaian tujuan partai politik dalam mendapatkan kekuasaan. Berjalannya sistem demokrasi dilalui dengan sebuah proses diseminasi visi misi partai dan calon kepala daerah/pemerintahan yang merupakan bagian dari budaya politik sebuah negara. Di Indonesia, kampanye merupakan media penyampaian visi misi politik yang memiliki tujuan akhir untuk memobilisasi dan mengoptimalkan dukungan terhadap partai tertentu.

Isu yang diangkat, ditawarkan dan diperjuangkan partai politik menjadi penting dan menentukan keberhasilan pola *marketing* partai politik terhadap konstituennya. Isu strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi pertimbangan penting masyarakat untuk menentukan pilihan politik. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis yang tidak pernah tertinggal untuk diusung kemudian dicantumkan dalam visi

misi setiap partai politik (Pane, 2014), dan menjadi salah satu pertimbangan penting para konstituen dalam menentukan pilihannya.

Isu pendidikan yang ditawarkan partai politik beragam klasifikasinya, namun isu pendidikan yang diangkat memiliki kecenderungan yang sama antarpartai politik atau antarpeserta kampanye. Diantaranya: penyelenggaraan pendidikan gratis, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan anggaran (Utomo, 2008). Isu pendidikan yang lazim diangkat dan dituangkan dalam visi misi partai politik peserta pemilu menunjukkan bahwa pendidikan dinilai sebagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan setiap orang. Diharapkan setiap orang dan kemudahan aksesibilitasnya terhadap pendidikan adalah sebuah kewajiban. Pendidikan merupakan kata kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan setiap warga.

Kondisi topografi dan demografi Indonesia yang beragam menciptakan sebaran kebutuhan pendidikan yang berbeda di setiap wilayah. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan mendorong pencapaian pendidikan inklusi dan berkeadilan. Pendidikan inklusi yang digagas pemerintah menekankan pada kesamaan pemberian layanan pendidikan kepada peserta didik dengan apapun kondisi peserta didik serta tidak dibatasi dengan adanya keterbatasan fisik dan mental peserta didik. Salah satu tujuan dari pendidikan inklusi adalah mewujudkan pendidikan berkeadilan, yaitu pendidikan yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh setiap warga secara merata dan mudah diakses.

Pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang di bidang pendidikan telah diamanatkan oleh undang-undang dan seiring dinamika perkembangan kebijakan pemerintah membawa wacana pendidikan gratis tidak hanya berhenti pada tahap wacana semata. Pendidikan gratis menjadi sebuah keniscayaan, dan pada kenyataannya di beberapa contoh pemilihan kepala daerah berhasil memberikan kemenangan kepada parta-partai pengusung tema pendidikan gratis ini. Mengambil contoh pemilihan kepala daerah Propinsi Sumatera Selatan, program Pendidikan Gratis 12 Tahun sudah berjalan di Sumatera Selatan sejak tahun

2008 (*University Network for Governance Innovation*, 2014). Program ini merupakan realisasi dari janji kampanye Gubernur Sumatera Selatan terpilih yang bertujuan mencapai pelayanan pendidikan yang layak, berkualitas dan merata kepada setiap warga Sumatera Selatan. Program Pendidikan gratis di beberapa daerah terbukti telah menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, dan juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut, salah satu contoh program pendidikan gratis di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi tersebut, termasuk mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah pada tingkat SD sederajat dari 2,38% pada 2008, turun menjadi 2,10% pada 2009, dan tersisa 1,85% pada 2010. Sementara, untuk SMP sederajat, 1,86% pada tahun 2008 menjadi 1,55% pada 2009, dan tersisa 1,45% pada tahun 2010 (Wedhaswary, 2011).

Program pendidikan, yang menjadi salah satu isi yang diangkat dalam pemilihan kepala daerah, pada beberapa kasus juga terbukti berimplikasi positif terhadap elektabilitas partai pengusung kepala daerah terpilih di daerah pemilihannya. Salah satu contoh adalah terpilihnya Joko Widodo pada tahun 2012 sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui salah satu kebijakan yang difokuskan pada isu pendidikan, yaitu perbaikan fasilitas dan aksesibilitas pendidikan bagi warga Jakarta melalui program Kartu Jakarta Pintar. Kebijakan tersebut diadopsi oleh Joko Widodo dan tim pemenangannya pada pemilihan Presiden RI yang kemudian menurut hasil survey telah meningkatkan elektabilitas sosok Joko Widodo ketika masa kampanye pemilihan Presiden berlangsung (Lingkaran Survei Indonesia, 2014).

Guru menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan suatu bangsa karena guru merupakan motor penggerak dari keberlangsungan proses pendidikan. Kesejahteraan guru menjadi perhatian penting dalam penciptaan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas, berdedikasi dan berkomitmen penuh terhadap tugas dan perannya sebagai seorang pendidik. Jumlah guru di Indonesia yang hingga tahun 2013 berjumlah 2,29 juta orang (Baswedan, 2012) akan

berimplikasi pada jumlah potensial suara dari para guru yang bisa didapatkan oleh para calon pemimpin daerah atau bahkan calon kepala negara yang akan bertarung di ranah pemilihan kepala daerah (pilkada) ataupun pemilihan umum (pemilu). Program sertifikasi guru dan dosen menjadi salah satu program populer yang diciptakan melalui sebuah mekanisme politik yang berpihak terhadap para guru dan tenaga pengajar lain. Program sertifikasi guru yang berjalan sejak tahun 2007 secara bertahap telah meningkatkan kesejahteraan dan menjamin masa depan guru sebagai motor pendidikan yang diharapkan secara otomatis meningkatkan kinerja para guru. Guru saat ini bukan lagi profesi yang diidentikan dengan sosok Oemar Bakrie yang sederhana, bersepeda dan hidup susah. Namun perlahan dan pasti mengubah guru sebagai profesi bergengsi dan menjanjikan di masa depan. Program Sertifikasi Guru pada tahun 2007 merupakan program unggulan calon presiden terpilih dan terbukti menjadi salah satu daya tarik masyarakat dan memberikan kemenangan kepada calon presiden terpilih tersebut.

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan, karena pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Teori Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia telah menjabarkan lima klasifikasi kebutuhan dasar manusia yang dituangkan dalam piramida kebutuhan (Ivancevich, Konopaske, & Matteson 2005). Pendidikan menjadi salah satu bagian utama dalam jenjang kebutuhan aktualisasi diri yang digagas oleh Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan muara dari empat kebutuhan lain saat keempat kebutuhan tersebut sudah terpenuhi. Aktualisasi diri secara psikologis memberikan dorongan dan keyakinan seseorang untuk tetap bertahan hidup dan menjalani hidup dengan nyaman sesuai dengan tujuan hidup itu sendiri. Pendidikan merupakan salah satu bagian utama dari proses aktualisasi diri dan membuat manusia memiliki *self of belonging* terhadap dirinya sendiri. Pendidikan secara perlahan akan membentuk kemampuan, kepribadian, dan keunikan dari setiap manusia dan pandangan

hidupnya. Sehingga dengan adanya pendidikan, seseorang akan diakui keberadaan dan kemampuannya oleh orang lain dan lingkungannya. Pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang apabila dituangkan dalam kebijakan politik, secara alamiah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi *voter* dalam menentukan hak pilihnya. Prinsip Teori Pilihan Publik menjelaskan kondisi tersebut pada sebuah kesimpulan bahwa naluri manusia berjalan secara logis dan ekonomis.

Proses politik merupakan model institusi pertukaran (*politics as exchange*), sehingga ada prinsip timbal balik di dalamnya. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan perbaikan lain di bidang pendidikan yang ditawarkan oleh partai politik dan disosialisasikan pada tahap kampanye akan meningkatkan preferensi individu dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar akan pendidikan dan aktualisasi dirinya. Masyarakat bersifat rasional termasuk dalam memilih partai politik atau calon pemimpin yang dinilai secara logis lebih dapat memberikan kepastian kebutuhan hidup yang lebih baik di masa depan, termasuk kebutuhan akan pendidikan. Rasionalitas menjadi dasar masyarakat sebagai voter menentukan preferensinya pada salah satu partai politik atau calon pimpinan tertentu yang dalam Teori Pilihan Publik disebut sebagai tindakan kolektif (*collective action*). Pada tahap ini, proses pertukaran terjadi antara kebijakan partai yang ditawarkan kepada masyarakat dan dukungan suara yang diberikan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Karakter proses politik adalah me-maksimumkan dukungan atau suara masyarakat yang dalam Teori Pilihan Publik dinamakan sebagai *vote maximizer*. Pendidikan sebagai isu strategis memberikan kontribusi positif dalam perannya sebagai *vote maximizer*, misalnya pada beberapa kasus memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pemilihan kepala daerah di lingkup propinsi dan kota/kabupaten.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa isu pendidikan yang ditawarkan partai

politik dalam kampanye memiliki kecenderungan yang sama antarpolitik/antar peserta kampanye. Diantaranya penyelenggaraan pendidikan gratis, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan anggaran bidang pendidikan. Pendidikan menjadi isu menarik bagi masyarakat dan pada beberapa kasus terbukti berhasil memaksimalkan dukungan (*vote maximizer*) masyarakat selaku konstituen terkait dengan proses penentuan pemimpin daerah melalui proses pemilihan umum.

Pendidikan dinilai sebagai salah satu bagian penting dari kebutuhan primer manusia yang merupakan bagian dari proses menuju peningkatan kesejahteraan hidup sehingga manusia dengan pendidikan akan dapat mengoptimalkan pengaktualisasian dirinya di lingkungannya. Isu pendidikan diinternalisasi ke dalam visi dan misi partai politik yang kemudian dijabarkan ke dalam visi misi calon Kepala Daerah atau Kepala Negara yang didiseminasikan kepada masyarakat dalam proses kampanye.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa hal yang dapat direkomendasikan terkait isu pendidikan yang seringkali dijadikan bahan kampanye politik partai atau para calon kepala daerah atau kepala negara adalah: 1) pendidikan jangan hanya dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan masyarakat akan partai politik/calon tertentu. Isu pendidikan harus termanifestasi dalam program kerja partai dan menjadi diimplementasi secara utuh dalam kegiatan-kegiatan partai agar memiliki asas kemanfaatan bagi masyarakat; 2) memasyarakatkan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia di segala tingkatan dan usia. Bukan dalam bentuk politik praktis, namun politik yang mendidik dan mengakar agar nilai-nilai demokrasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses politik dipahami secara penuh, menyeluruh, dan disadari oleh setiap masyarakat. Sehingga dalam menentukan pilihan dan afiliasi politiknya, masyarakat dapat kritis menilai visi misi partai/calon kepala daerah secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan ketercapaian (*feasibilitas*) program pendidikan yang ditawarkan.

Pustaka Acuan

- Baswedan, A. 2012. "*Menyentuh Hati Generasi Berprestasi*", paparan disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jumat, 25 Mei 2012, www.tempo.co.id, diakses pada 3 Juli 2014.
- Barents, J. 1965. *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*. Terjemahan L.M. Sitorus. Jakarta: PT Pembangunan.
- Buchanan, J. 1989. *Essays on Political Economy*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Budiardjo, M. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewey, J. 1964. *Democracy and Education*. New York: The Mc. Milan Company.
- Ghazaly, E. 2014. "*Kampanye Platform*". <http://www.duniaesai.com>, diakses pada 25 Juni 2014.
- Henderson, S. V. P. 1959. *Introduction to Philosophy of Education*. Chicago: The University of Chicago.
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., dan Matteson, M. T. 2005 (edisi ketujuh). *Perilaku dan Manajemen Organisasi* (terj. Gina Gania). Jakarta: Erlangga.
- Lingkar Survey Indonesia. 2014. "*Ini Penyebab Elektabilitas Jokowi Naik Lagi*". <http://>

beritasatu.com, diakses 17 November 2014.

Ma'ruf, O & Yusuf R.H.M. 2004. *Era Baru Pemimpin Baru, Tahun 2004: Datangnya Sang Tunjung Putih*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia (LASPI).

Nasution, Z. 2014. "Partai-Partai Mau Jual Isu Apa", <http://www.sinarharapan.co.id/berita>, diakses 3 Juli 2014.

Nugroho, R. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Pane, D. 2014. "Jokowi Sodorkan Kurikulum Budi Pekerti, Prabowo Anti Korupsi". <http://nefosnews.com>, diakses 17 September 2014.

Prasojo, E. 2005. *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Rachbini, D. J. 2002. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soltau, R. H. 1961. *An Introduction to Politics*. London: Longmans, Green & Co.

Tambak, S. 2013. *Membangun Bangsa melalui Pendidikan: Gagasan Pemikiran dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas untuk Kemajuan Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

University Network for Governance Innovation. 2014. "Database Good Practice: Pendidikan Gratis 12 Tahun di Sumatera Selatan", igi.fisipol.ugm.ac.id, diakses pada 3 Juli 2014.

Utomo, S. Prasetyo. 2008. Isu Politik dalam Kebijakan Pendidikan. <http://djojar1962.blogspot.com/2008/02/isu-politik-dalam-kebijakan-pendidikan.html>, diakses pada 12 Juni 2014.

Widjaja, A. 1982 (cetakan pertama). *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Wedhaswary, I. D. 2011. "Program Pendidikan Gratis Habiskan Rp 800 Miliar". <http://edukasi.kompas.com>, diakses 17 November 2014.